

Harvina

Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing Di Kota Medan



Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

*Organisasi Sosial
Masyarakat Mandailing
Di Kota Medan*

HARVINA

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

**Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks +62651 - 23226**

Banda Aceh 2012

Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing
Harvina - Banda Aceh
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012
vi+000
ISBN 978-602-9457-11-7

Judul:
Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing
Harvina
Copyrights ©2012

Editor
Drs.Agustrisno, MSP

Setting : Harvina

Cover : Lizar Andrian (www.antarafoto.com)

Diterbitkan oleh BPSNT Banda Aceh
Hak Cipta dilindungi Undang – Undang
All rights reserved

Penerbit
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No.17 Banda Aceh

Telp/Faks.
+62651 – 23226
[http.www.bpsnt-bandaaceh.com](http://www.bpsnt-bandaaceh.com)

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

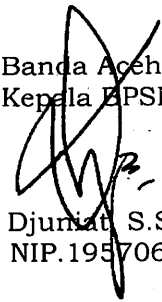
KATA SAMBUTAN

Penerbitan buku ini dilaksanakan sebagai realisasi tupoksi BPSNT Banda Aceh dalam menggali, menginventarisasi, mengkaji, dan mensosialisasi nilai-nilai sejarah dan budaya dalam masyarakat di provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi terbitnya buku "Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing Di Kota Medan" sebagai tambahan referensi bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, penulisan tentang Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing ini untuk menginformasikan perkumpulan etnis Mandailing mulai dari kegiatan-kegiatannya yang melestarikan budaya Mandailing hingga fungsi dan peranan dari Organisasi tersebut yang tentu saja sangat berguna bagi pelestarian kebudayaan bangsa, terutama kepada generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan bangsa pada saat ini dan masa mendatang.

Kami berharap kepada penulis agar terus berkarya dan terus memperbaiki kedalaman kajiannya dalam rangka mendokumentasikan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga dapat diambil hikmah dan bermanfaat dalam meningkatkan spirit dalam pembangunan bangsa bagi generasi muda dan seluruh elemen bangsa demi melangkah bersama ke masa depan menuju bangsa yang lebih baik dan bermartabat.

Banda Aceh, Oktober 2012
Kepala BPSNT Banda Aceh,



Djuniat S.Sos.
NIP.195706071979031011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang membawa wahyu Allah SWT, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan sebuah kajian yang berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing di kota Medan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut hingga fungsi dan peranan dari organisasi tersebut. Selain itu, juga ingin menggambarkan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi kehidupan para anggotanya.

Penulis menyadari dalam buku ini banyak sisi yang masih kosong dan belum terisi mengenai perjalanan organisasi ini, karena kekurangtahuan dan keterbatasan informasi yang kami diperoleh selama meneliti. Untuk itu, kekurangan dan kesilapan kiranya tetap menjadi revisi dan perbaikan bagi penyempurnaan di kemudian hari.

Akhirnya, berangkat dari segala keterbatasan dan kekurangan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Djuniat, S.Sos dan Irini Dewi Wanti, SS,MAP yang telah memberikan arahan dan bimbingan juga kepada para informan terutama Bapak Lutfi Faizailsyah Lubis yang telah membantu dalam penelitian. Semoga menjadi langkah awal yang baik, dalam upaya menambah pengetahuan tentang organisasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Banda Aceh, Oktober 2012
Penulis,

Harvina, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
DAFTAR ISI	v	
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	3	
C. Tujuan Penelitian	4	
D. Tinjauan Pustaka	4	
E. Ruang Lingkup	7	
F. Metode Penelitian	8	
BAB II. Gambaran Umum Kota Medan		10
A. Sejarah Singkat Kota Medan	10	
B. Letak Geografis	12	
C. Kepadatan Penduduk Kota Medan	14	
D. Kota Medan Berdasarkan Etnis	17	
E. Fasilitas Transportasi Kota Medan	19	
F. Agama dan Kepercayaan Penduduk Medan	23	
BAB III. Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing		24
A. Sejarah Migrasi Masyarakat Mandailing	26	
- Rintisan Mandailing Dalam Perantauan	28	
B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandailing	32	
- Unsur Dalihan Na Tolu	36	
- Mekanisme Kerja Lembaga Dalihan Na Tolu	39	
C. Perkumpulan / Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing	40	
- Sejarah Berdirinya HIKMA	42	
- Tujuan Organisasi HIKMA	45	
- Struktur Organisasi HIKMA	46	
- Keanggotan HIKMA	51	
- Aktivitas/Keanggotan HIKMA	54	
- Fasilitas-fasilitas HIKMA	59	
- Perubahan-Perubahan HIKMA dari Dalam dan Luar	63	

BAB IV. Kesimpulan	68
DAFTAR PUSAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Seorang manusia tidak akan pernah lepas dari suatu organisasi/ pranata mulai dari ia membuka mata sampai ia meninggal ia akan berada dalam suatu organisasi/ pranata. Jadi, hampir seluruh kehidupan seorang manusia dihabiskannya dengan mengadakan interaksi dengan individu lain dalam pranata-pranata. Sejak waktu dilahirkan, pada saat seseorang menjadi warga dari sesuatu keluarga, mulai menyesuaikan dirinya dengan orang lain, dan selama waktu-waktu di luar tidurnya perilakunya terus-menerus dibentuk oleh tindakan-tindakan orang lain.

Dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan pergaulan hidup dengan sesamanya. Oleh karena itu, baik secara sadar atau tidak, ia akan membentuk perkumpulan untuk menunjang kepentingannya. Perkumpulan-perkumpulan ini yang dalam antropologi sering disebut dengan organisasi sosial.

Organisasi sosial ialah mencakup pranata-pranata yang menentukan kedudukan lelaki dan perempuan dalam masyarakat, dan dengan demikian dapat menyalurkan

hubungan pribadi mereka (Melville J. Herskovits, 1999:82). Pada umumnya pranata-pranata ini dibagi lagi dalam tiga jenis atau tingkat, yaitu:

- Pranata yang tumbuh dari hubungan kekerabatan
- Pranata yang dikondisikan oleh wilayah geografis yang berdasarkan tempat tinggal
- Pranata yang merupakan hasil dari ikatan antara perorangan berdasarkan keinginan sendiri

Struktur-struktur kekerabatan mencakup keluarga dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau *clan*. Sedangkan ikatan di antara orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan mulai dari “persaudaraan sedarah” dan persahabatan yang dilembagakan sampai ke berbagai macam “perkumpulan” wilayah.

Perkumpulan/ organisasi sosial ini akan banyak kita jumpai pada daerah urban, seperti Jakarta dan Medan. Seperti yang kita ketahui, kota Medan adalah daerah urban yang dihuni oleh berbagai suku bangsa di dalamnya, dimana salah satunya ialah suku Mandailing. Menurut Perret (2010:337) pada akhir tahun 1910-an Medan menjadi tempat ekspresi solidaritas baru yang terwujud dalam berbagai perkumpulan, menurut wacana tampil sebagai bukti penyesuaian diri dengan kemajuan dan tanda keterbukaan ke arah sebuah dunia baru, tempat “bangsa-bangsa” bersaing untuk kemajuan itu, dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur kesatuan masing-masing “bangsa”.

Masyarakat Mandailing yang menetap di daerah Medan pada umumnya membentuk perkumpulan, seperti perkumpulan marga, perkumpulan keluarga besar Mandailing, atau perkampungan Mandailing sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan baik di bidang finansial maupun aliansi politik. Perkumpulan persaudaraan *Setia Mandailing* didirikan tahun 1917 dan perkumpulan *Persatoean Mandailing* lahir pada awal tahun 1930-an. Perkumpulan ini didirikan untuk memperkuat kesatuan masyarakat Mandailing (Daniel Perret, 2010:346).

Di saat sistem kerjasama semarga telah mengalami perubahan mendasar dalam beberapa aspek, biasanya orang-orang Batak yang migrasi ke tempat lain tetap menjunjung tinggi identitas etnis mereka. Keberadaan suatu masyarakat di suatu daerah biasanya diakui karena adanya organisasi sosial masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang sifatnya merantau. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana perkumpulan/ organisasi sosial orang Mandailing ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka di daerah rantau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sosial itu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan suatu kelompok manusia. Maka penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang organisasi sosial masyarakat Mandailing yang dirumuskan sebagai berikut:

- Apa dasar pembentukkannya

- Apa saja kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut
- Apa fungsi dan peranan dari organisasi tersebut dan apakah berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai dimensi sosial, budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keberadaan dan bentuk-bentuk organisasi sosial, bagaimana kegiatan organisasi tersebut serta mendeskripsikan peranan organisasi tersebut dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Selain itu juga sebagai bahan informasi untuk masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Manusia dilahirkan sendiri, tetapi dalam kehidupan selanjutnya memerlukan orang lain (masyarakat). Dengan cara itu terbentuklah beberapa kelompok atau organisasi dengan masing-masing membentuk pimpinan dan peraturan tertentu yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya. Dari pernyataan tersebut lahirlah apa yang disebut dengan organisasi/ pranata sosial. Pranata-pranata itu terwujud karena menyentuh beberapa dari faktor penggerak biologis yang paling mendalam dari dalam kehidupan manusia.

Organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang bersifat universal yang hampir dapat ditemukan dalam banyak masyarakat di dunia. Seperti yang diungkapkan oleh (Ahimsa-Putra, dlm Sri Alem & Piet Rusdi, 2010: 17) ia menyatakan tidak ada masyarakat di bumi ini yang tidak memiliki organisasi sosial, sehingga organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang memungkinkan suatu masyarakat atau kebudayaan tetap ada. Ini berarti bahwa keberadaan, eksistensi organisasi sosial juga turut menentukan eksistensi masyarakat dan kebudayaan sendiri.

Oleh karena itu, memahami organisasi sosial menjadi sangat penting artinya bagi pemahaman mengenai masyarakat dan kebudayaan. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat serta kebudayaan akan dapat dilakukan dengan relatif cepat dan mudah apabila dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap organisasi sosial sebagai pintu masuknya (Ahimsa-Putra, dlm Sri Alem & Piet Rusdi, 2010: 17).

Organisasi sosial merupakan pola-pola pengaturan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari pengaturan-pengaturan ini terlihat dari adanya keteraturan dalam masyarakat; adanya keterulangan aktivitas dalam masyarakat. Berkenaan dengan 'pola pengaturan', berarti pola pengaturan perilaku dan tindakan, perlu dibedakan antara 'pola bagi' (*pattern off*) dan 'pola dari' (*pattern for*), atau pola bagi perilaku, tindakan, dan pola dari perilaku, tindakan (Marthen Pattipelay, 2009:4).

Pola bagi perilaku (*pattern for behavior*) wujudnya tidak lain adalah aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, pandangan hidup yang membimbing, mengarahkan perilaku, yang kemudian membuat perilaku-perilaku ini tampak teratur, tampak berulang dan dapat diperkirakan munculnya (Marthen Pattipelay, 2009:4). Nilai, norma, aturan dan sebagainya ini menjadi pola yang digunakan oleh manusia untuk membimbing perilakunya dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi.

Dalam sebuah organisasi sosial dapat diketahui adanya aktivitas-aktivitas anggota-anggotanya, yang berulang tetap berdasarkan norma atau aturan yang mengendalikan, membimbing perwujudan aktivitas-aktivitas mereka. Selain itu dalam organisasi sosial juga terdapat peran dan fungsi setiap anggota-anggota atau masyarakatnya, yang tercermin lewat aktivitas yang dapat memberikan manfaat, lewat fungsi sosialnya. Keberadaan organisasi sosial ini selalu dipertahankan oleh masyarakatnya, melalui pola perilaku sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang terkandung didalamnya.

Setiap organisasi sosial di dalam masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur geografis dan ekologis yang dihadapi. Organisasi sosial masyarakat biasanya mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan lingkungannya, seperti model-model pengetahuan, tata ruang, sistem mata pencaharian hidup dan pranata-pranata sosial.

Dalam ilmu antropologi organisasi sosial masuk kepada unsur-unsur kebudayaan. Adapun unsur-unsur bagian dari

suatu kebudayaan secara universal (Koentjaraningrat,1999) ialah:

1. Bahasa
2. Sistem Teknologi
3. Sistem Ekonomi
4. Organisasi Sosial
5. Sistem Pengetahuan
6. Kesenian dan
7. Sistem Religi

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi dalam dua pengertian. Pertama, ruang lingkup wilayah, kedua, ruang lingkup materi penelitian. Ruang lingkup wilayahnya adalah di Medan, Kecamatan Medan Amplas. Untuk ruang lingkup materi penelitian ialah (1) tujuan dan manfaat organisasi, serta nilai-nilai yang muncul atau terbentuknya organisasi ini, (2) aspek organisasi (pengaturan) meliputi struktur organisasi; proses pemilihan pengurus serta norma-norma dan aturan-aturan dari organisasi ini, (3) aspek aktivitas meliputi aktivitas rutin, sedangkan (4) aspek dinamika dan perubahan meliputi sebab-sebab terjadinya perubahan, serta bentuk-bentuk perubahan.

F. Metode Penelitian

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sarachmad (1970: 132) menyebutkan:

Metode penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, sesuatu kegiatan, hubungan pandangan, sikap yang menampak atau tentang sesuatu proses yang sedang berlangsung, kelainan yang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncingkan dan sebagainya.

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang bersifat alamiah tentang organisasi sosial.

2. Pengumpulan Data

Natsir (2003: 328) menyebutkan, “teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam data yang berkaitan dengan focus penelitian yang diteliti”.

Berdasarkan pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka.

- Observasi

Observasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan penginderaan. Pengamatan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan Organisasi sosial pada masyarakat Mandailing. Selain itu, dicarikan dan ditetapkan hal-hal yang akan dilakukan dalam kegiatan wawancara.

- Wawancara

Teknik wawancara digunakan karena ingin menggali keterangan yang lebih mendalam tentang organisasi sosial masyarakat Mandailing melalui pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya dari informan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang dimintai informasi berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

- Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data yang diperkirakan berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian terhadap organisasi sosial. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai tulisan yang relevan dengan objek yang diteliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN

Medan adalah sebuah kota dengan masyarakat yang heterogen. Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan juga merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit lawang dan Danau Toba.

A. Sejarah Singkat Kota Medan

Menurut bahasa Melayu, MEDAN berarti “tempat berkumpul”, karena sejak zaman dahulu kala tempat berkumpulnya orang-orang dari Hamperan Perak, Sukapiring dan lain-lain untuk berdagang, bertaruh dan lain-lain (Tengku Luckman Sinar, 2006:53). Nama tempat, “Medan” ditemukan untuk pertama kalinya dalam laporan kunjungan Anderson di Pesisir Timur tahun 1823. Saat itu, Medan memiliki sekitar 200 orang penduduk. Seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Keadaan itu pernah melahirkan perselisihan

dengan Sultan Deli yang mengugat ke sah'an legalitas kegiatan tersebut. Sewaktu Anderson singgah, pasukan Sultan sedang mengepung kubu-kubu musuhnya itu (Daniel Perret, 2010:277).

Empat puluh tahun kemudian, perwajahan Medan tampaknya tidak berubah, terbukti tahun 1866, Cats Baron de Raet ragu-ragu menganggapnya sebagai kampung. Tahun 1869, Medan dipilih sebagai tempat tinggal pengelola perkebunan *Deli-Maatschappij*. Medan terletak di tepi sungai Deli, yang berada 22 kilometer ke arah hilir, di tengah sejumlah konsesi *Deli-Maatschappij*. Medan juga dipandang sebagai sejenis Buitenzorg dibandingkan dengan Labuhandeli yang berawa-rawa. Sebelum tahun 1879, bangunan-bangunan utama yang ada hanyalah kantor pusat administrasi dan rumah sakit (sejak 1874) *Deli-Maatschappij*. Sebuah garnisun beranggotakan sekitar seratus orang ditempatkan di sana sejak 1873, mungkin akibat pemberontakan Sunggal yang pecah tahun sebelumnya.

Tahun 1879, asisten-residen Deli meninggalkan Labuhandeli untuk menetap di Medan. Perpindahan itu dengan cepat diikuti pembangunan gedung-gedung administrasi dan tahun berikutnya Medan menjadi sebuah *onderafdeeling* sepenuhnya (Daniel Perret, 2010:277).

Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara

besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra dan seorang Tionghoa.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh kuli perkebunan kemudian di dorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.

B. Letak Geografis

Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha di tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/ kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah

yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3°30'-3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'- 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut, sebelah:

Utara: Selat Malaka

Selatan: Kabupaten Deli Serdang

Barat: Kabupaten Deli Serdang

Timur: Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraaan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor).

Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota itu sendiri dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota Medan saat ini.

C. Kepadatan Penduduk Kota Medan

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter.¹ Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa dengan didasarkan pada jumlah laki-laki sebanyak 1.040.680 dan jumlah perempuan sebanyak 1.068.659 jiwa.² Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

¹. [id.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

². Ibid....

Penduduk Kota Medan Menurut Jenis Kelamin

Population by Sex of Medan City

1997 - 2009

Tahun <i>Year</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1997	943 594	955 434	1 899 028
1998	944 379	956 688	1 901 067
1999	944 891	957 609	1 902 500
2000	945 847	958 426	1 904 273
2001	960 477	966 043	1 926 520
2002	979 106	984 776	1 963 882
2003	990 216	1 003 386	1 993 602
2004	995 968	1 010 174	2 006 142
2005	1.012.040	1.024.145	2.036.185
2006	1 027 607	1 039 681	2 067 288
2007	1 034 696	1 048 460	2 083 156

2008	1 039707	1 062398	2 102105
2009	1 049 457	1 071 596	2 121 053

Sumber : **Medan Dalam Angka** *Medan In Figure*, 2010

Di lihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif (15-59 tahun). Selanjutnya di lihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup dan dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industry manufaktur.

Laju pertumbuhan penduduk kota Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per km² pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area dan Medan Timur. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki - laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita 71 tahun.³

³. Ibid....

D. Kota Medan Berdasarkan Etnis

Kota Medan merupakan daerah yang memiliki warga yang beraneka-ragam suku dan bahasa. Jumlah penduduk Kota Medan terdiri dari warga negara asing (WNA) dan golongan penduduk warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari beberapa suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, suku bangsa Mandailing, suku bangsa Toba, suku bangsa Aceh, suku bangsa Pak-pak, suku bangsa Minangkabau dan sebagainya.

Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling atau Kampung Madras yang sekarang dan merupakan daerah pemukiman orang keturunan India.

Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan di huni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.

**Perbandingan etnis di Kota Medan pada tahun 1930,
1980, dan 2000**

Etnis	Tahun 1930	Tahun 1980	Tahun 2000
<u>Jawa</u>	24,89%	29,41%	33,03%
<u>Batak</u>	2,93%	14,11%	-- (lihat Catatan)
<u>Tionghoa</u>	35,63%	12,8%	10,65%
<u>Mandailing</u>	6,12%	11,91%	9,36%
<u>Minangkabau</u>	7,29%	10,93%	8,6%
<u>Melayu</u>	7,06%	8,57%	6,59%
<u>Karo</u>	0,19%	3,99%	4,10%
<u>Aceh</u>	--	2,19%	2,78%
<u>Sunda</u>	1,58%	1,90%	--

Lain-lain	14,31%	4,13%	3,95%
-----------	--------	-------	-------

Sumber: 1930 dan 1980: Usman Pelly, 1983; 2000: BPS
Sumut

Catatan: Data BPS Sumut tidak menyenaraikan "Batak" sebagai suku bangsa, total Simalungun (0,69%), Tapanuli/Toba (19,21%), Pakpak (0,34%), dan Nias (0,69%) adalah 20,93%

Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota banyak tinggal di pinggiran kota. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksu dan Sungai Mati.

E. Fasilitas Transportasi Kota Medan

Banyak fasilitas transportasi yang dapat kita gunakan bila kita ingin berkeliling kota Medan, salah satunya dengan

menggunakan becak motor. Keunikan kota Medan terletak pada becak motornya (becak mesin) yang dapat ditemukan hampir di seluruh Medan. Berbeda dengan becak biasa (becak dayung), becak motor dapat membawa penumpangnya kemana pun di dalam kota. Selain becak, dalam kota juga tersedia angkutan umum berbentuk minibus (angkot/ *oplet*) dan taksi. Pengemudi becak berada di samping becak, bukan di belakang becak seperti halnya di Jawa, yang memudahkan becak Medan untuk melalui jalan yang berliku-liku dan memungkinkan untuk diproduksi dengan harga yang minimal, karena hanya diperlukan sedikit modifikasi saja agar sepeda atau sepeda motor biasa dapat digunakan sebagai penggerak becak. Desain ini mengambil desain dari sepeda motor gandengan perang Jerman di Perang Dunia II.

Selain becak motor yang unik transportasi lain yang dapat digunakan ialah minibus. Angkutan umum yang berbentuk minibus ini mempunyai sebutan yang khas yaitu Sudako. Sudako pada awalnya menggunakan minibus Daihatsu S38 dengan mesin 2 tak kapasitas 500cc. Bentuknya merupakan modifikasi dari mobil pick up. Pada bagian belakangnya diletakkan dua buah kursi panjang sehingga penumpang duduk saling berhadapan dan sangat dekat sehingga bersinggungan lutut dengan penumpang di depannya.

Trayek pertama kali sudako adalah “Lin 01” (Lin sama dengan trayek) yang menghubungkan antara daerah Pasar Merah (Jl.HM.Joni), Jl. Amaliun dan terminal Sambu, yang merupakan terminal pusat pertama angkutan penumpang ukuran kecil dan sedang. Saat ini “Daihatsu S38 500 cc” sudah tidak digunakan lagi karena faktor usia dan berganti dengan

mobil-mobil baru seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, Daihatsu Zebra dan Espass.

Selain itu, masih adalagi angkutan lainnya yaitu bemo yang berasal dari India. Beroda tiga dan cukup kuat menanjak dengan membawa 11 penumpang. Bemo kemudian digantikan oleh Bajaj yang juga berasal dari India yang di Medan dikenal dengan nama “toyoko”. Masih ada juga kereta api yang menghubungkan Medan dengan Tanjungpura di sebelah barat laut, Belawan di sebelah utara dan Binjai-Tebing Tinggi-Pematang Siantar dan Tebing Tinggi-Kisaran Tanjungbalai-Rantau Prapat di tenggara. Jalan Tol Belmera menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa. Jalan tol Medan-Lubuk Pakam dan Medan-Binjai juga sedang direncanakan pembangunannya.⁴

Rata-rata Kelembaban Udara Menurut Jam dan Stasiun di Kota Medan

Average Humidity by Hours and Stations in Medan City

2006 – 2009

Tahun/Jam <i>Year/Time</i>	S t a s i u n <i>Stations</i>	
	Polonia	Sampali

⁴. [id.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan).

(1)	(2)	(3)
07.00 WIB <i>(West Indonesian Time)</i>	94	93
13.00 WIB <i>(West Indonesian Time)</i>	62	68
18.00 WIB <i>(West Indonesian Time)</i>	73	89
Rata-rata/ <i>Average</i>		
2009	76	
2008	82	
2007	82	
2006	82	

Sumber : **Medan Dalam Angka Medan In Figure**, 2010

F. Agama dan Kepercayaan Penduduk Medan

Dalam kehidupan masyarakat Medan, agama sangat penting artinya sebagai landasan dan sistem kontrol dalam kehidupannya, baik sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku dan mengerjakan suatu perbuatan. Setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi sesuai yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut oleh manusia tersebut.

Penduduk Kota Medan pada umumnya adalah pemeluk agama Islam dan Kristen. Agama Islam banyak dianut oleh suku bangsa Melayu, Jawa, Mandailing, Aceh, dan Minangkabau, dan beberapa penduduk suku bangsa Karo juga suku Pakpak. Sedangkan agama Kristen, penganutnya adalah sebagian besar orang-orang dari suku bangsa Batak Toba, Karo, Pakpak, Nias dan sebagainya. Agama Budha dan Konghucu dominan dianut oleh orang-orang Tionghoa. Agama Hindu adalah agama yang dianut kebanyakan orang-orang Tamil.

BAB III

ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT MANDAILING

Seperti yang kita ketahui sejak manusia dilahirkan, pada saat mana seseorang menjadi warga dari sesuatu keluarga dan mulai menyesuaikan dirinya pada orang lain dan selama waktu-waktu di luar tidurnya perilakunya terus-menerus dibentuk oleh tindakan-tindakan orang lain. Kalau kita berusaha melukiskan perilaku seseorang dan berdasarkan gambaran diatas tersebut ini memperlihatkan bahwa hubungan di antara setiap individu dalam keadaan saling tergantung (Herskovits, J. Melville,1999:107).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa manusia tidak akan terlepas dari pranata-pranata sosial dimana “Hampir seluruh kehidupan seorang individu dihabiskannya dengan mengadakan interaksi dengan individu lain di dalam pranata-pranata. Sebab keberadaan orang-orang dalam pranata/ organisasi tersebut pada dasarnya adalah untuk bekerja sama, berkumpul untuk membentuk kegunaan yang saling melengkapi antara satu individu dengan individu lainnya, atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini akan terlihat semakin transparan ketika orang-orang di dalam wadah tersebut melakukan hubungan interaksi aktivitas yang

berfungsi sebagai satu kesatuan masyarakat dengan satu tujuan dalam perbedaan antara individu dengan individu lainnya.

Konteks kerja sama dan berkumpul ini tergambar dari bentuk aktivitas dalam wadah organisasi itu yang di masyarakat, berfungsi untuk menterjemahkan aktivitas yang ada dalam kebudayaannya. Aktivitas kebudayaan itu antara lain: mata pencaharian, kekerabatan, teknologi, agama, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan aktivitas tersebut, individu-individu yang tergabung dalam organisasi itu akan meresponnya lewat partisipasi, maka akan terlihat gambaran solidaritas antara individu dengan individu lainnya. Bentuk-bentuk solidaritas ini tetap akan mengarah pada peran dan status dari anggota-anggota kelompok atau pranata dalam melaksanakan aktivitasnya. Peran dan status tentunya menjadi kunci dari bentuk organisasi sosial masyarakat, karena peran dan status yang transparan akan menggambarkan keseluruhan sistem dalam tubuh organisasi masyarakat tersebut.

Kerja sama antara individu dengan individu lainnya dalam organisasi masyarakat sangat berhubungan dengan kuat lemahnya aturan, nilai, pengetahuan dan norma yang mengikat sesuai dengan kebudayaan yang dianut dan menggunakan kebudayaan tersebut. Karena itu tanpa pranata-pranata/ organisasi sosial yang menyediakan mekanisme untuk mengatur perilaku, maka integrasi perorangan ke dalam masyarakat tidak akan mungkin.

A. Sejarah Migrasi Masyarakat Mandailing di Kota Medan

Migrasi bukanlah perilaku acak, sebab itu orang-orang yang memutuskan untuk bermigrasi dapat dianggap sebagai orang-orang pilihan dari antara populasi (Guillet dan Uzzel dlm Usman Pelly, 1994:8). Sedangkan pernyataan Butterworth (1971), walau kemiskinan di pedesaan merupakan faktor yang mendorong penduduk meninggalkan tanahnya, gerakan keluar (merantau) itu sifatnya sangat selektif dan kemiskinan itu sendiri tidak merupakan alasan yang cukup untuk bermigrasi.

Keadaan-keadaan biografi personal mungkin merupakan faktor-faktor selektif yang menentukan individu-individu mana yang cenderung bermigrasi. Menurut Butterworth (1971) usia merupakan satu-satunya faktor selektif yang universal, namun Lomnitz (1976) menemukan bahwa keadaan seperti ini benar hanya pada kelompok pendatang yang pertama atau perintis. Sekali para perantau muda itu telah merasa mapan di kota, mereka akan mengundang keluarga mereka yang masih tinggal di desa asal mereka untuk ikut bermigrasi, tanpa pilihan usia. Kriteria utama dalam mengevaluasi teori-teori ini ialah dalam menentukan karakteristik-karakteristik orang-orang yang bermigrasi dan beradaptasi kepada kehidupan kota. Supaya bisa memperoleh perspektif yang lebih luas maka selain faktor-faktor selektif tersebut, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor kultural yang menggerakkan migrasi ke kota (Usman Pelly,1994: 8).

Suatu model migrasi dari masyarakat Mandailing, dimana kelompok etnik Mandailing sebagian besar dikenal

sebagai muslim konservatif yang memiliki suatu tradisi patrilineal yang kuat dalam hal suksesi, pewarisan, identitas, dan legitimasi serta lebih cenderung untuk melakukan perluasan teritorial. Masyarakat Mandailing ini memiliki apa yang disebut sebagai “ misi budaya”. Misi budaya ini sebagai seperangkat tujuan yang diharapkan dicapai oleh anggota-anggota suatu masyarakat tertentu, yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat tersebut.

Masyarakat Mandailing menempati lahan baru dan menguasainya sebagai bagian dari “kerajaan Batak” (*Batak harajoan*). Anak-anak keturunan mereka dianggap sebagai kekuatan baru bagi kerajaan pribadi (*sahala harajoan*). Anak dan tanah menyimbolkan kekuasaan dan kekayaan yang mereka anggap sebagai hasil dari harga diri (*sahala hasongopon*) yang diperoleh dari kerajaan (*harajoan*). Karena itu masyarakat Mandailing bermigrasi dengan motto: “carilah anak, carilah tanah” (*halului anak, halului tano*). Menurut Kramer, kompleks “harga diri” ini menggerakkan suku Batak merantau untuk mendirikan kerajaan-kerajaan (*harajoan-harajoan*) baru. Kemudian kompleks “harga diri” ini juga ditafsirkan sebagai keinginan untuk menjadi “nomor satu”.

Misi perantau Mandailing adalah meluaskan wilayah mereka, maka mereka tidak merasa harus membawa pulang harta dan pengetahuan ke kampung halamannya. Lagi pula, kampung halaman hanyalah suatu “tempat *training*” untuk migrasi, tempat mempersiapkan anak-anak muda merantau berbekal harta dan pendidikan. Sebelumnya sudah diatur dengan para keluarga di daerah rantau untuk member perlindungan dan pondokan sementara.

Masyarakat Mandailing di kampung halamannya memberikan perlakuan yang baik kepada para perantau yang berhasil maupun yang gagal. Para perantau mengunjungi orang tua dan saudara-saudara sekali setiap satu atau dua tahun. Perantau yang berhasil lalu mempergunakan sebagian hartanya untuk memperbaiki makam leluhur. Perantau yang gagal cukup mengunjungi orang tua dan makam leluhur untuk berdoa demi keberhasilan mendatang di daerah rantau. Orang-orang kampung di Mandailing tidak menyesali perantau yang gagal, sebaliknya mereka menyesali para keluarga mereka di rantau sehingga menjadikan keluarga di rantau sebagai kambing hitam bagi kegagalan.

- Rintisan Mandailing Dalam Perantauan Ke Sumatera Timur

Kurang dari sepuluh tahun setelah pemulihan Mandailing dari serangan Padri dan setelah *Kuria* mulai mengembangkan pendidikan, generasi muda Mandailing mulai merantau ke Sumatera Timur. Jalan perantauan pertama ke Sumatera Timur bukanlah jalan yang dibangun Belanda melalui Sibolga, Tarutung, Danau Toba dan Simalungun; jalan yang paling banyak dipakai ialah melalui Angkola, Padang Lawas, Kota Pinang, dan Asahan. Cerita rakyat dan legenda banyak bercerita tentang jalan ini sebagai jalur lama migrasi orang Mandailing ke Sumatera Timur.

Di Sumatera Timur, para perantau Mandailing dihormati karena pendidikannya, terutama setelah pemerintahan Belanda membuka perkebunan-perkebunan. Pertumbuhan agrikultur perkebunan yang cepat di Sumatera

Timur memerlukan banyak orang terdidik untuk bekerja di kantor-kantor. Sultan Deli membangun istana barunya di Medan dalam 1888 dan membangun administrasi pemerintahannya. Pemerintah Belanda juga memerlukan banyak orang berpendidikan. Perluasan Medan menjadi kotapraja dalam 1905 merupakan sebuah indikator dari pengaruh-pengaruh adanya perkebunan. Perkebunan mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan, distribusi, dan komposisi populasi sebagai akibat dari migrasi dan juga terhadap perkembangan kesultanan-kesultanan dan pemerintah Belanda. Medan menjadi pusat perubahan ekonomi yang cepat di belahan barat Hindia Belanda (Usman Pelly, 1994: 64).

Para perantau Mandailing di Sumatera Timur menyediakan cadangan orang-orang terdidik bagi pemerintah Belanda yang bisa diperkerjakan sebagai kerani, juru ukur dan tukang mesin selain dalam posisi-posisi kecil lainnya (Reid, dlm Usman Pelly, 1994:65). Walau sebagian besar suku Mandailing hanya lulusan kelas tiga sekolah dasar di kampungnya, ketika mereka merantau ke Medan mereka mudah memperoleh pekerjaan di kantor-kantor.

Banyak perantau Mandailing yang lulus dari madrasah dipekerjakan oleh Sultan Deli sebagai Kadhi dan Imam serta jabatan-jabatan lain dalam pengadilan agama. Sebelum akhir abad ke sembilan belas, banyak suku Mandailing yang berpendidikan sekolah-sekolah Normal, MULO, dan AMS (SMP dan SMA Belanda) memegang jabatan-jabatan yang cukup baik dalam pemerintahan Belanda, selain dalam perusahaan-perusahaan perkebunan.

Kebanyakan orang-orang terdidik berasal dari kalangan bangsawan Mandailing, Angkola, dan Padang Lawas karena sekolah-sekolah tersebut kebanyakan hanya menerima murid-murid dari keluarga priyayi. Juga keluarga-keluarga kelas menengah atas yang secara formal memusatkan usahanya pada perdagangan kemudian makin menunjukkan minat pada pendidikan dan dinas pemerintah. Karena itu, generasi kedua pedagang-pedagang Mandailing dan Angkola/ Sipirok di kota-kota Sumatera Timur kebanyakan menjadi pegawai negeri dan menjauhkan diri dari minat masa lalu orang tua mereka sebagai pedagang.

Para pegawai Mandailing yang mempunyai posisi-posisi bagus mencoba memasukkan anggota-anggota keluarga mereka dalam posisi-posisi tertentu di administrasi. Karena pegawai negeri harus melalui proses magang, maka dalam satu generasi saja telah muncul dinasti pegawai. Kelompok “pegawai” elite baru Mandailing muncul sebelum akhir abad ke sembilan belas.

Sebagian besar perantau Mandailing membaaur ke dalam budaya Melayu-Muslim, terutama para pedagang dan petani. Mereka tidak lagi memakai nama-nama marga mereka, walau masih menyimpan tarombo (silsilah keturunan) mereka, karena memakai nama marga bisa ketahuan hubungan dekat mereka dengan Batak Toba. Bersamaan dengan orang Mandailing, juga bermigrasi ke Sumatera Timur masyarakat Sipirok, Angkola, dan Padang Lawas. Walau di Tapanuli Selatan mereka berasal dari wilayah-wilayah yang berbeda dengan batas-batas yang relatif jelas dan berbicara dengan dialek-dialek Batak yang agak berbeda, di Sumatera Timur mereka semua, terutama

yang berada di Medan, mengaku sebagai “Mandailing” (Usman Pelly, 1994 : 66).

Kesultanan-kesultanan Melayu tidak menyadari bahwa mereka itu berbeda satu sama lain. Suku Sipirok, Angkola, dan Padang Lawas sengaja menyembunyikan perbedaan-perbedaan itu dari orang Melayu, karena masyarakat Mandailing sebagai “perantau awal” sudah lebih dahulu dikenal baik oleh orang Melayu. Sultan-sultan Melayu menganggap semua orang Tapanuli Selatan sebagai orang Mandailing dan beragama Islam.

Masyarakat Sipirok, Angkola dan Padang Lawas berpartisipasi dalam semua kegiatan- kegiatan sosial, ekonomi dan politis dalam kelompok orang Mandailing di kota Medan. Kesultanan-kesultanan Melayu baru menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya salah satu dari sub-etnik Batak hanya setelah perbedaan-perbedaan antara kelompok-kelompok itu didramatisir dalam “peristiwa Kuburan Sei Mati” dalam 1923. Seperti disebutkan oleh Drammond (Usman Pelly, 1994:66), identitas kelompok selalu dan akhirnya akan merupakan suatu produk dari tindakan simbolik dari sesuatu kelompok lain, apakah itu, seperti dalam hal ini, Mandailing, Sipirok, Batak, atau Melayu.

Dari penjelasan di atas tersebut kita bisa melihat bahwa dengan merantau/ bermigrasi masyarakat Mandailing telah menjalankan misi budaya. Misi budaya ini dapat mempengaruhi pemilihan pekerjaan dan tempat-tempat pemukiman, karakter dari setiap asosiasi (organisasi paguyuban) yang didirikan oleh para perantau, dan hubungan-

hubungan sosial masyarakat perantau dalam konteks kota, termasuk hubungan-hubungan dengan masyarakat-masyarakat tuan rumah. Namun, yang akan kita bahas disini adalah salah satu dari misi budaya merantau masyarakat Mandailing yaitu tentang pembentukan **asosiasi (organisasi paguyuban) yang didirikan oleh para perantau dari Mandailing.**

B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandailing

Dapat dikatakan bahwa daerah Mandailing Natal adalah daerah hunian dari orang Mandailing. Namun, sesungguhnya yang menjadi penduduk asli di daerah ini bukan hanya masyarakat Mandailing, tetapi ada kelompok etnis lain yaitu orang Lubu (biasa juga disebut orang Siladang) yang bermukim di Kecamatan Muara Sipongi, dan ada pula orang Pesisir Natal yang bermukim di kawasan pesisir barat (Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis). Sedikitnya ada empat kelompok penutur bahasa yang berbeda di daerah Mandailing Natal, yaitu bahasa Mandailing, bahasa Lubu, bahasa Ulu, dan bahasa Pesisir Natal. Hanya saja dengan penduduk yang mayoritas dan etnis Mandailing di kabupaten ini maka orientasi budaya masyarakatnya didominasi oleh budaya dan bahasa Mandailing (Mudhafarsyah, 2007:29).

Keberadaan kelompok-kelompok etnis tersebut di daerah Mandailing Natal sudah berabad-abad yang lalu. Secara antropologis, orang Lubu (Silodang) dan orang Ulu (Muara Sipongi) termasuk ras proto-melayu, dan secara fenotik yang artinya fenotif ciri fisik memang memiliki perbedaan dengan

orang-orang Mandailing. Orang pesisir Natal merupakan produk akulturasi antara Mandailing dan Minangkabau, yang terjadi beberapa abad lalu, diduga ketika jalur perhubungan antar benua masih melewati pantai barat atau Samudera Hindia.

Masyarakat Mandailing diperkirakan sudah mendiami kawasan Mandailing Natal beberapa abad yang lalu. Di daerah ini banyak ditemukan situs-situs purbakala yang menandakan bahwa kawasan ini sudah dihuni manusia sejak berabad-abad lalu. Di suatu lokasi yang disebut Padang Mardia di daerah Panyabungan terdapat beberapa peninggalan batu yang diperkirakan dari masa *Mesolithicum*. Di Simangarambat (Siabu) terdapat pertapakan Candi Hindu yang menurut data arkeologis bertaruh abad ke-9 Masehi. Di Pidoli Lombang terdapat peninggalan-peninggalan candi Budha dari abad ke-14, di lokasi yang oleh penduduk disebut Saba Biar.

Selanjutnya, jika ditelusuri dari silsilah marga-marga yang tertua di Mandailing, misalnya Lubis, Nasution, dan Pulungan, diketahui bahwa kehadiran mereka di daerah ini sudah lebih dari lima abad yang lalu. Sekedar sebagai contoh, marga Lubis misalnya menurut hikayat berasal tokoh Daeng Malela yang berasal dari Makassar dan berlayar ke Sumatera sekitar abad ke-14.

Menurut silsilah ada 4 generasi dari Daeng Malela ke tokoh leluhur marga Lubis yang makamnya ada di Sigalangan (Kecamatan Batang Angkola), yaitu Namora Pande Bosi III. Anak dari Namora Pande Bosi III yang bernama Silangkitang dan Sibaitang menelusuri Sungai Batang Angkola dan Batang

Gadis lalu bermukim di Hutanopan (Kotanopan); mereka inilah yang menurunkan marga Lubis di Mandailing (Mudhafarsyah, 2007:31).

Dari tokoh Namora Pande Bosi III kepada generasi yang ada sekarang sudah ada sekitar 21 generasi, dan jika digabungkan dengan 4 generasi sebelumnya sudah mencapai 25 generasi, sehingga diperhitungkan nenek moyang marga Lubis sudah berada di tanah Mandailing sejak 625 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 1380 Masehi (abad ke-14).

Di dalam *paradaton* hubungan antara individu satu sama lain didasarkan kepada lembaga adat *dalihan na tolu*. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Mandailing yang sifatnya patrilineal (menurut garis keturunan bapak), maka perkawinan sifatnya *eksogam*, artinya perkawinan dilakukan antar marga. Dari perkawinan antar marga ini timbullah 3 (tiga) unsur yang satu sama lain saling terkait, saling memberi, saling menerima, saling mendengar dan bersikap serta bertindak secara serasi, selaras dan seimbang. Di dalam pelaksanaan kepemimpinan adat dan pada upacara-upacara adat ketiga unsur ini memegang peranan penting.

Dalihan na tolu secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponen (unsur) nya terdiri dari 3 (tiga) (Pandapotan, 2005).

Dalihan na tolu pada masyarakat adat Mandailing, mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan

tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga *dalihan na tolu* ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.

Dalihan na tolu yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut terdiri dari kelompok (Pandapotan, 2005):

- a. *Suhut* dan *kahangginya*
- b. *Anak boru*
- c. *Mora*

Ketiga unsur (kelompok) ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan kedudukan dan fungsi ini ditentukan oleh kedudukannya, apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai *kahanggi*, *anak boru* atau *mora*. Jika pada suatu saat tertentu seseorang berkedudukan sebagai *kahanggi*, *mora* dan *anak boru* maka pada saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi dan tempat.

Setiap orang secara pribadi memiliki 3 (tiga) dimensi dalam kedudukannya sebagai unsur *dalihan na tolu* ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itulah masyarakat Mandailing selalu dapat menyesuaikan diri jika dibutuhkan.

- **Unsur Dalihan Na Tolu**

- a. *Suhut* dan *kahangginya*

Yang dimaksud dengan *suhut* dan *kahangginya* adalah suatu kelompok keluarga yang semarga atau yang mempunyai garis

keturunan yang sama dalam satu *huta* yang merupakan *bonabulu* (pendiri kampung).

Suhut berkedudukan sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. *Suhut* dan *kahanggi* terdiri dari (Pandapotan, 2005) :

1. *Suhut*
2. *Hombar suhut (kahanggi)*
3. *Kahanggi pareban* (kelompok orang/ seseorang yang kedudukannya menjadi kahanggi, karena sepenngambilan (isterinya bersaudara).

Di dalam suatu *huta* (kampung) dikenal dengan apa yang disebut *namora-mora di huta*, yang dimaksudkan dengan *namora* adalah keraba-kerabat, *kahanggi* dan raja *huta* (yang mendirikan *huta* dan yang masih satu keturunan dan semarga dengannya).

1. “*Suhut*” adalah mereka yang merupakan tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara adat (yang punya hajatan). Kelompok inilah yang merupakan penanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut.
2. *Hombar suhut*, adalah keluarga dan *kahanggi* semarga dengan *suhut* tetapi tidak satu nenek. *Hombar suhut* ini tidak hanya yang berasal dari *huta* yang sama, tetapi juga dari luar *huta* yang masih mempunyai hubungan keluarga dan semarga dengan *suhut*.

3. *Kahanggi pareban*, adalah keluarga kelompok pertama dan yang ketiga sama-sama mengambil isteri dari keluarga yang sama. Dalam status adat *kahanggi pareban* ini dianggap sebagai saudara markahanggi berdasarkan perkawinan.

b. Anak boru

Anak boru adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil isteri dari kelompok *suhut*. *Anak boru* sebagaimana halnya dengan *suhut* dibagi atas:

1. *Anak boru bona bulu* (anak boru asal pangalehenan ni boru)
2. *Anak boru busir ni pisang* (anak boru pangalehenan ni boru)
3. *Anak boru sibuat boru*

Ad.1) *Anak boru bona bulu*, yaitu *anak boru* yang telah mempunyai kedudukan sebagai *anak boru* sejak pertama kalinya *suhut* menempati *huta*.

Ad.2) *Anak boru busir ni pisang*, yaitu *anak boru* yang karena orang tuanya mengambil isteri dari kelompok *suhut*.

Ad.3) *Anak boru sibuat boru*, yaitu *anak boru* yang mengambil isteri dari *suhut*, dengan demikian ia berkedudukan sebagai *anak boru (sibuat boru)*.

c. *Mora*

Mora adalah tingkat keluarga yang oleh *suhut* mengambil *boru* (isteri) dari kelompok ini. *Mora* terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. *Mora mata ni ari*
2. *Mora ulu bondar (pangalapan boru)*
3. *Mora pembuatan boru*

Ad.1) *Mora mata ni ari* adalah kelompok keluarga yang secara turun-temurun menjadi *mora*, karena kelompok *suhut* sejak pertama kalinya, telah mengambil *boru* dari kelompok ini.

Ad.2) *Mora ulu bondar (pangalapan boru)* adalah *mora* tempat kelompok *suhut* mengambil *boru*. *Mora* ini adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberi *boru* kepada *suhut*, oleh karena itu secara turun temurun kelompok *suhut* dapat mengambil *boru* dari kelompok *mora* ini.

Ad.3) *Mora pembuatan boru*, yaitu kelompok keluarga tempat *suhut* mengambil isteri. *Mora* sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya memberikan *boru* kepada keluarga *suhut*.

- **Mekanisme Kerja Lembaga Dalihan Na Tolu**

Sebagaimana disebut di atas bahwa lembaga *Dalihan Na Tolu* berperan di dalam upacara-upacara adat. Kedudukan *suhut/kahanggi*, *anak boru* dan *mora* yang di dalam situasi, kondisi yang berbeda akan memberikan kedudukan yang berbeda, akan menimbulkan rasa saling menghormati, saling

memberi, saling menerima, saling mendengar satu sama lainnya. Hubungan kekeluargaan yang sangat erat sebagai akibat perkawinan, rasa tanggung jawab, rasa saling memiliki, di dalam setiap pelaksanaan upacara akan tetap terpelihara.

Bagaimana hubungan ketiga unsur *dalihan na tolu* ini satu sama lain sudah diatur di dalam hukum adat. Bagi lembaga *dalihan na tolu* tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan adalah merupakan hak dan kewajiban. Cara kerja *dalihan na tolu* merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang dan saling mendukung.

Di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang sifatnya kebahagiaan (sirion), seperti: perkawinan; atau yang sifatnya kesedihan (siluluton), seperti: musibah kematian, ketiga unsur *dalihan na tolu*, harus tetap dalam *mardomu ni tahi* (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Musyawarah untuk mufakat akan tercapai jika unsur rasa kesatuan, rasa tanggung jawab dan rasa saling memiliki tersebut tetap terpelihara. Berhasilnya suatu pekerjaan ditentukan oleh (Pandapotan, 2005) :

1. Adanya rasa persatuan dan kesatuan
2. Adanya rasa memiliki
3. Adanya rasa tanggung jawab

Ketiga faktor ini harus saling mendukung. Jika salah satu faktor ini tidak berfungsi, maka segala pekerjaan tidak akan berhasil dengan baik.

C. Perkumpulan/ Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing

Misi budaya merantau masyarakat Mandailing telah membentuk suatu asosiasi/ organisasi yang didirikan oleh para perantau dari Mandailing. Perkumpulan persaudaraan *Setia Mandailing* didirikan tahun 1917 kemudian perkumpulan *Persatoean Mandailing* lahir pada awal tahun 1930-an dan bertujuan memperkuat kesatuan masyarakat Mandailing (Daniel Perret, 2010: 346). Perkumpulan ini khususnya ditugaskan untuk mengkaji pembentukan *Groepsgemeenschap* di Tapanuli sebagaimana direncanakan oleh Pemerintah.

Pendirian organisasi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Mandailing untuk memulai pembangunan dari dasar atau dari diri mereka sendiri. Selain itu juga bertujuan menyambut pendatang-pendatang baru dalam berbagai pertemuan, di dalam pertemuan-pertemuan itu, dilakukan perdebatan mengenai Mandailing dan budayanya. Bagaimana cara agar masyarakat Mandailing yang berada di perantauan ikut serta menjadi motivator pembangunan di daerahnya.

Sesungguhnya berbicara mengenai masalah organisasi dan menghadapi masyarakat Mandailing, bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Diperlukan pimpinan bermental baja, tahan banting, kuping tebal, kemauan keras, gigih, sabar, bijaksana. Disamping itu harus mampu menampung aspirasi anggotanya. Sebaliknya harus sanggup bertindak tegas bila telah dianggap wajar. Juga tidak mengharap imbalan di

bidang material. Hal-hal tersebut merupakan ketentuan yang sangat penting artinya bila kita ingin memimpin masyarakat Mandailing, karena yang pasti kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Misalnya apa yang dikatakan: *gut-gut, incak, so batas, gotap otang, sulaha*.

Boleh dikatakan selama ini organisasi masyarakat Mandailing umumnya berbentuk STM (serikat tolong menolong) yang hanya bergerak di bidang pengajian dan kemalangan. Oleh karena itu, keinginan yang besar dari masyarakat Mandailing untuk membuat sebuah organisasi yang besar dan kuat yang bisa mempersatukan semua masyarakat Mandailing. Maka di bentuklah sebuah organisasi yang bernama HIKMA (Himpunan Keluarga Besar Mandailing). HIKMA didirikan adalah usaha untuk mempersatukan masyarakat Mandailing yang terpecah-pecah di daerah perantauan yang seolah-olah tidak mempunyai ikatan lagi.

- Sejarah Berdirinya HIKMA

Masyarakat Mandailing memerlukan sebuah lembaga untuk upaya mensejahterahkan masyarakatnya. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama HIKMA. Himpunan Keluarga Besar Mandailing ini terbentuk pada tanggal 21 Juni 1986, bertempat di Yayasan Perguruan Mandala Nusantara, Jalan Pertina No. 1A, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Medan.

Sebagai pelopor pendiri HIKMA ini dapat disebutkan beberapa tokoh adat, agama, masyarakat dan cendekiawan, seperti: Mangaraja Lelo Lubis, Marwan Fawzi Lubis, Drs.

Asnan Daud Dalimunthe, Drs. H. Samuel Lubis, H.M.Y. Effendy Nasution serta Lukman Lubis. Pada saat itu H.M.Y. Effendi Nasution duduk sebagai Ketua Umum wilayah Sumatera Utara.

Salah satu anggota pendiri HIKMA ini mempunyai keinginan membina masyarakat dari suku Mandailing untuk dapat lebih merapatkan barisan serta mengadakan reformasi terhadap adat dan budaya Mandailing. Reformasi itu dikarenakan semenjak dahulu kala peradatan-peradatan yang ada pada masyarakat Mandailing hanya dipakai oleh mereka yang keturunan raja-raja dan yang terpandang saja. Masyarakat kecil tidak sanggup membuat adat ini, karena untuk mengangkat peradatan harus ada penyembelihan kerbau setidak-tidaknya sebanyak 1 ekor.

Apalagi dalam pesta adat *mangalap boru*, pemukulan Gordang Sambilan sebagai adat besar masyarakat Mandailing tidak boleh asal di pukul atau dimainkan. Pemakaian gondang ini hanya yang boleh raja-raja saja, sedangkan yang tidak memakai gelar Mangaraja, Sutan, Daulat sama sekali tidak boleh memakai gondang walau dia kaya sekalipun. Salah seorang pendiri HIKMA beranggapan bahwa itu terjadi pada zaman dahulu kala. Namun, Gordang Sambilan sebagai salah satu peralatan musik tradisional Mandailing telah dipalu mengiringi gerak kehidupan masyarakatnya yang tersebar di pelosok-pelosok desa kawasan Sumatera Utara. Suara gongnya yang anggun berdengung di sela-sela rentak kaki yang menortor.

Gordang dan gong tersebut kini tidak lagi hanya untuk menyambut seorang raja yang akan memberikan titahnya. Akan tetapi lebih dari itu, kini oleh HIKMA Gordang dan gong itu dipalu untuk membangkitkan *tondi* (tuah) masyarakat Mandailing terutama yang berada di tanah rantau. Itulah yang dilakukan oleh para pendiri organisasi HIKMA bersama tokoh-tokoh masyarakat Mandailing yang ada di kota Medan dan sekitarnya.

Banyaknya putra-putri yang berasal dari Mandailing yang mempunyai potensi yang lebih, baik di bidang pendidikan; karier politik, keagamaan, maupun sebagai wiraswastawan. Mereka cukup ulet sehingga selalu berhasil di perantauan. Tidak sedikit putra-putra Mandailing yang berpangkat Jenderal, Jabatan Menteri, yang memperoleh keserjanaan dan mempunyai kekayaan yang melimpah. Ironisnya semua prestasi yang mereka peroleh itu, hampir tak ada yang mengalir untuk membangun daerah asalnya. Bahkan diantara sesama mereka yang berada di rantau kurang memiliki solidaritas untuk saling menopang.

Selain itu, "*Dalihan Na Tolu*" sebagai lembaga tradisional yang mengikat unsur-unsur kekerabatan dalam suatu kelompok masyarakat Mandailing, tidak berhasil membentuk solidaritas sosial yang lebih luas. Demikian juga para tokoh-tokoh tradisional, sejak zaman kolonial maupun pergolakan-pergolakan politik selanjutnya, semakin tak berperan. Banyak nilai-nilai tradisioanl yang secara filosofis seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar integritas masyarakat Mandailing menjadi kehilangan makna. Akibatnya, masing-masing berpacu untuk dirinya sendiri dan tidak lagi

berorientasi memajukan daerah asalnya atau tanah Mandailing secara terpadu.

Terjadilah kompetisi antara sesama mereka dan cenderung kepada egoisme. Sebaliknya ada pula latar belakang budaya mereka sendiri yang menyebabkan tetap mapan di tanah rantainya. Daerah-daerah yang dibuka bagaikan kerajaan baru bagi mereka. Mereka tak akan beranjak lagi dari situ karena ditempat yang baru inilah “*tondi*” (semangatnya) menetap. Dari alasan-alasan tersebut maka para pendiri HIKMA ini bersemangat untuk mendirikan organisasi HIKMA, agar para masyarakat Mandailing bersatu memajukan daerahnya dan tetap melestarikan adat budayanya.

- Tujuan Organisasi HIKMA

Setiap organisasi yang didirikan pasti mempunyai suatu tujuan tertentu, begitu juga dengan organisasi HIKMA. HIKMA sendiri didirikan bertujuan untuk menciptakan jatidiri berbudaya, guna mencapai efektivitas potensi persatuan, sosial dan budaya serta ekonomi, dalam komunitas etnis Mandailing dalam kerangka peningkatan kesejahteraan anak bangsa.

HIKMA tidak sekedar lembaga yang mengefektifkan dan mengembangkan adat istiadat dan budaya Mandailing yang berorientasi seni pagelaran untuk seremonial semata, tetapi HIKMA memiliki visi dan misi yang lebih luas. Selain itu, HIKMA juga melakukan perluasan interpretasi adat istiadat dan budaya serta kemudian mengapresiasi secara konkrit dalam konteks kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keinginan dari organisasi HIKMA untuk kesejahteraan dan mensejahterakan orang lain mesti menjadi bagian dari adat istiadat dan budaya Mandailing. Adat istiadat pada konsep dasar dimengerti sebagai tata tertib berkehidupan dan pola hidup yang sistematis agar kehidupan seseorang berdaya guna untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika adat istiadat berjalan ideal maka budaya akan mencerminkan pola hidup yang bermoral. Sehingga dari titik ini adat istiadat tersebut bisa menghantarkan jiwa seseorang lebih mengenal arti kehidupannya, sehingga tidak sekedar ingin mensejahterakan dirinya sendiri tapi juga saudara-saudaranya.

Berdasarkan inilah HIKMA, yang kini dalam penanganan *middle regeneration* (generasi menengah), akan mengaplikasikan perspektif tadi, dengan berbagai sistem yang profesional, elegan melalui program-program yang disusun berdasar gagasan yang direformasi dengan paradigma baru dan merupakan representatif dari aspirasi kalangan akademik. Dari titik ini kemudian, akan lahir satu kondisi yang menggiring warga Mandailing memaknai prinsip ingin sejahtera dan mensejahterakan orang lain.

Organisasi HIKMA sudah menciptakan berbagai program untuk memperjelas dan mempertegas perspektif itu melalui program interpreneur, bidang pendidikan, sosial dan sebagainya. Sehingga adat istiadat dan budaya Mandailing jangan hilang dari jati diri siapapun dari keluarga Mandailing dan proses kehidupannya mesti berasaskan adat istiadat budaya Mandailing yang mengandung profesionalitas kerja dan tujuan sejahtera bersama dalam prinsip kesetiakawanan sosial.

Organisasi HIKMA ini juga mempunyai fungsi untuk menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota dan masyarakat Mandailing serta membina Putra Putri Mandailing dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

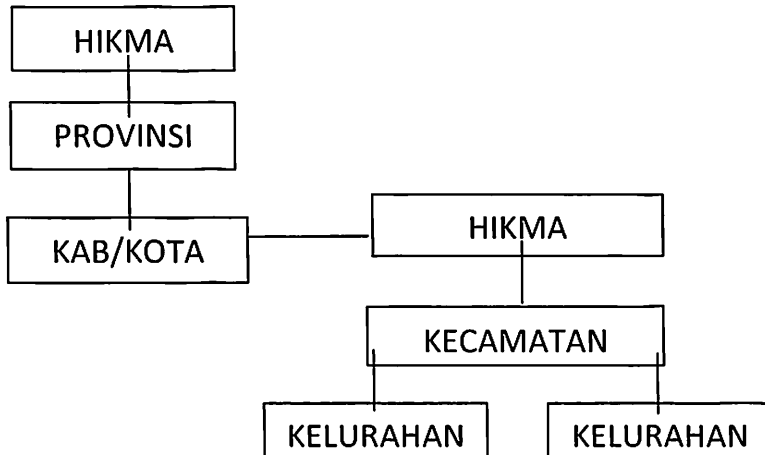
- Struktur Organisasi HIKMA

Organisasi HIKMA adalah organisasi Nasional berbentuk kesatuan dan merupakan wadah berhimpunnya Keluarga besar Mandailing, adapun struktur organisasi HIKMA.

Struktur organisasi ini adalah sebagai berikut:

- Pimpinan Himpunan Keluarga Besar Mandailing terdiri dari Pimpinan Pusat (DPP), Pimpinan Daerah tingkat I (Propinsi), Pimpinan Daerah tingkat II (Kabupaten/ Kotamadya/ Kota Administratif), Pimpinan Daerah tingkat III (Kecamatan), Pimpinan Komisaris (Kelurahan/ Desa

- STRUKTUR ORGANISASI HIKMA -



Kekuasaan tinggi organisasi ini adalah pada:

1. Kongres (tingkat Nasional)
2. Konfrensi Daerah tingkat I (KONPERDA) untuk tingkat Provinsi
3. Konfrensi Daerah tingkat II (KONPERDA) untuk tingkat Kabupaten/ Kotamadya/ Kota Adminitratif
4. Musyawarah wilayah Kecamatan (MUSWILCAM) untuk tingkat Kecamatan
5. Rapat anggota untuk tingkat Komisaris Kelurahan/ Desa

HIKMA, sebagai salah satu organisasi kedaerahan di kawasan Sumatera Utara telah berkembang pesat. Adakalanya, justru kepesatannya itu yang menjadikan kendala, terutama dalam mengkonsolidasi aktivitas pengurus di tingkat cabang dan komisariss. Sampai saat ini telah terbentuk 17 Tk. II (Kab/ Kodya) 141 Kecamatan (Tingkat III) dan 500 Komisariss (Kelurahan/ Desa) ditambah lagi dengan organisasi-organisasi binaan seperti:

1. Himpunan Wanita Mandailing (HIKWAN) Tk.I SU
2. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasisiwa Mandailing (HPPMM)
3. Lembaga Bantuan dan Pembelaan Hukum Mandailing (LBPH)
4. Himpunan Alim Ulama Mandailing (HIKUM)
5. Himpunan Keluarga Besar Nelayan Mandailing (HINAMA)
6. Himpinan Pengusaha Mandailing (HPM)
7. Himpunan Pekerja dan Penempatan Tenaga Kerja Mandailing (HPPTKM)
8. Persadaan Marga-Marga

Organisasi-organisasi binaan yang dibentuk oleh Organisasi HIKMA mempunyai azas yang sifatnya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selain itu, organisasi binaan ini bersifat mandiri serta

tidak terikat secara organisatoris. Organisasi binaan ini mempunyai aturan-aturan, yaitu:

1. Organisasi binaan ruang geraknya tidak terbatas dan selalu berkonsultasi dengan pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Besar Mandailing.
2. Organisasi binaan merupakan pelaksanaan umum Himpunan Keluarga Besar Mandailing menurut bidangnya masing-masing.

Keberadaan masyarakat Mandailing di kota ada yang mengikatkan diri pada perkumpulan marga, yang disebut dengan *parsadaan*, adalah fenomena yang tidak terdapat di daerah asal. *Parsadaan* ini juga merupakan organisasi binaan dari organisasi HIKMA, walau mereka sebenarnya secara langsung tidak terikat pada organisasi HIKMA. Mereka secara leluasa membina organisasinya sendiri, namun tetap mendapat pengawasan dari HIKMA.

Contoh dari perkumpulan marga atau *parsadaan* ialah *Parsadaan Rangkuti*. *Parsadaan Rangkuti* ini telah dibentuk pada tahun 1984 di kota Medan. Tugas dari *parsadaan Rangkuti* ialah:

- Memberikan arahan tentang marga/ *tarombo*
- Mengetahui adat budaya dan agama

Sedangkan tujuan dari *parsadaan Rangkuti* ini ialah untuk masyarakat Mandailing yang bermarga Rangkuti dapat mengetahui asal usul atau marganya tidak hilang. Di samping

itu, upacara-upacara adat dan keagamaan yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang juga diselenggarakan dengan melibatkan orang-orang dalam lingkungan perkumpulan marga. Selebihnya perkumpulan marga juga berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga dan adat (Panjaitan, dlm Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum,2003).

Bagaimanapun perkumpulan marga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Batak di kota, sebab betapapun seseorang mengidentikkan dirinya sebagai orang modern di kota besar bila ia berhadapan dengan masalah keluarga, maka ia akan kembali kepada nilai-nilai tradisional lama, sehingga ia memiliki dua ciri sekaligus, yaitu *superculture* dan *biculturalism* (Geertz, dlm Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum,2003). Dalam beberapa perkumpulan marga/*persadaan*, terdapat kegiatan yang rutin berupa arisan, di samping kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan upacara adat. Bagaimanapun juga aktivitas dalam perkumpulan marga, yang diintensifkan melalui berbagai pertemuan dan pesta adat, sangat memperkuat dan mempertebal rasa solidaritas kelompok yang bersangkutan.

- Keanggotaan HIKMA

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota menyebabkan tuntutan imbalan yang sepadan. Oleh karena itu, bila anggota merasa antara kewajiban dan haknya menjadi timpang timbullah sikap skeptis mereka, yang lebih penting lagi, para anggota juga menuntut perhatian moral dari

pimpinan cabang dan wilayah. Mereka selalu memperhatikan, apakah para pengurus HIKMA selalu hadir dalam musibah keluarga anggota-anggotanya? Apakah mereka juga diperhatikan dalam resepsi-resepsi yang diadakan pengurus HIKMA? Para anggota ini selalu bersikap sangat kritis dan menuntut perhatian yang sama, tak mau “dikecilkan” atau dibedakan berdasarkan “pemilihan” ataupun “kedudukan” Inilah salah satu kendala yang dihadapi para pengurus HIKMA.

Adapun hak dan kewajiban anggota HIKMA ialah:

1. Setiap anggota berkewajiban mengajukan pendapat, saran tertulis ataupun lisan kepada pemimpin organisasi.
2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan semua yang termasuk di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Keluarga Besar Mandailing serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Organisasi.
3. Setiap anggota berhak memiliki kartu anggota yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Tingkat I Himpunan Keluarga Besar Mandailing

Adapun syarat-syarat menjadi anggota HIKMA atau yang dapat diterima menjadi anggota HIKMA ialah:

1. Suku yang bermarga yang berasal dari Mandailing

2. Suku yang bermarga yang menyatakan diri termasuk marga Mandailing
3. Suku lainnya yang berhubungan darah dan simpati dengan suku Mandailing
4. Ditetapkan dan disahkan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Himpunan Keluarga Besar Mandailing sesuai dengan peraturan organisasi

Anggota HIKMA terdiri dari:

1. Anggota biasa ialah orang yang telah diterima menjadi anggota menurut ketentuan keanggotaan HIKMA dan mempunyai kewajiban dan hak terhadap organisasi
2. Anggota kehormatan ialah pemuka-pemuka dan pimpinan masyarakat yang simpati serta mendorong dan menyokong kegiatan organisasi
3. Anggota simpatisan ialah orang yang bersimpati kepada organisasi ini dan memberikan sumbangan moril ataupun materil.

Pasal 3

1. Setiap anggota diharuskan memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Besar Mandailing tingkat I Sumatera Utara
2. Anggota kehormatan dan anggota simpatisan dapat diberikan piagam yang dikeluarkan oleh Pimpinan

Daerah Himpunan Keluarga Besar Mandailing tingkat Nasional (DPP), tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kabupaten/ Kotamadya/ Kota Administratif)

Organisasi HIKMA ini juga memiliki aturan dalam hal kepengurusan anggota-anggotanya, yaitu:

1. Yang dipilih dan diangkat menjadi Pimpinan Organisasi Himpunan Keluarga Besar Mandailing ialah anggota yang dipandang mampu serta cakap mengemban tugas organisasi.
2. Anggota pimpinan yang berakhir jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan rapat.
3. Masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun untuk tingkat pusat dan tingkat I, sedangkan untuk tingkat II berlaku selama 3 (tiga) tahun, tingkat III selama 2 (dua) tahun dan tingkat Komisaris 1 (satu) tahun.

- **Aktivitas/ Kegiatan HIKMA**

Salah satu pendekatan yang dilakukan HIKMA dalam membangkitkan masyarakat Mandailing adalah melalui unsur kesenian. Organisasi HIKMA selalu mengadakan sayembara-sayembara kesenian, seperti Gordang Sambilan, Tor-tor, Qasidah dan yang lainnya. Kalau dulu untuk memukul Gordang Sambilan hanya bisa dilakukan oleh kaum pria, maka kini kaum wanitanya pun tidak mau ketinggalan. Dalam salah satu sayembara Gordang Sambilan yang pernah dilakukan oleh HIKMA di Gelanggang Remaja Medan pada tahun 1990,

beberapa *group* yang mewakili telah menampilkan kaum komisarisan wanita.

Ketrampilan dan penampilan mereka tidak mengecewakan, dengan penuh semangat kelompok kaum wanita ini telah memukul Gordang Sambilan yang mengumandangkan suaranya yang dinamis. Kemudian, HIKMA juga pernah mengadakan sayembara qasidah di Tanah Mandailing. Begitu antusiasnya sambutan masyarakat setempat. Hampir setiap kampung ikut berpartisipasi menampilkan *group* qasidahnya. Mereka bagaikan berhari raya menyambut sayembara itu. Berbagai piala yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara telah dibagikan kepada para pemenangnya. Di antara piala-piala itu terdapat sumbangan Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Bupati, Panglima Daerah Militer I Bukit Barisan dan sebagainya.

Demikian juga dengan kesenian tari Tor-tor yang disponsori HIKMA. Remaja-remaja Mandailing dan etnis lainnya yang ada di kawasan Sumatera Utara, kembali mempelajarinya. Bahkan remaja etnis Tionghoa yang ada di kota Medan ikut berpartisipasi dan mempelajarinya. Dalam salah satu sayembara tarian Tor-tor di kota Medan, di antara pesertanya ada yang terdiri dari etnis Tionghoa. Dengan memasyarakatkan kesenian tradisional di kalangan WNI keturunan, dapat lebih memacu usaha “pembauran”, itulah salah satu tujuan dari HIKMA.

Organisasi HIKMA juga telah menciptakan berbagai lagu yang bersyairkan bahasa Mandailing, baik dalam irama

Pop maupun qasidah. Lagu-lagu itu telah direkam dan diperbanyak. Radio Amatir ALNORA yang pada saat itu dipimpin oleh H. Adnan Lubis turut berpartisipasi memancarkan “Gema Mandailing”, dengan memutar lagu-lagu itu. Lagu-lagu tersebut banyak diciptakan oleh Drs.Z.Pangaduan Lubis dan Amir Yakub Batubara. Demikian pula “ Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk”, kumpulan syair yang di tulis oleh Willem Iskandar di abad XIX selalu mengisi program pemancar Radio Amatir ALNORA (Nasution,1999:284).

Mereka ini telah berbuat banyak tanpa mengharapkan imbalan keuntungan materi, kecuali harapan untuk membangkitkan “tondi” masyarakat yang berasal dari etnis Mandailing. Tanpa mengenal dirinya, masyarakat Mandailing itu tak akan mampu berbuat lebih banyak terutama untuk membangun daerah asalnya. Sungai atau Aek Batang Gadis meliuk-liuk mengitari Tano Mandailing. Berabad-abad sudah memberikan kasih sayang pada petak-petak sawah tempat penghidupan putra-putri Mandailing. Kini, airnya yang selalu jernih semakin surut, ikan-ikan Mera (Jurung) semakin langka menyelinap ke dalam lukah. Beras yang di tanak, tak lagi menimbulkan aroma yang harum. Pancuran buluh di tapian tak lagi sejuk membas tubuh yang penat. Kesemuanya bagaikan menghimbau putar-putri yang ada diperantauan bahwa Tano Mandailing bukan menuntut balas budi, tetapi ia menginginkan perhatian dan kasih sayang dari putar-putri yang telah dilahirkannya dan kini berada di perantauan.

Sekarang ini Gordang Sambilan yang merupakan kesenian masyarakat Mandailing harus dilestarikan bersama

kesenian lainnya. Kalau dibiarkan Gordang Sambilan ini hanya akan dipakai oleh turunan raja saja, maka tidak lama lagi kesenian ini akan hilang, karena raja-raja yang sudah ada banyak yang telah mengalami kepailitan dan miskin, karena itu organisasi HIKMA perlu mengangkat kembali kesenian Gordang Sambilan sebagai salah satu kesenian Mandailing yang perlu dilestarikan.

Apalagi masyarakat Mandailing sudah banyak yang kaya dan maju. Sehingga dalam hal satu ini hanya mereka yang ingin menonjolkan kesenian daerahnya, karena masyarakat lain di luar masyarakat Mandailing pun tetap menonjolkan kesenian mereka yang ada. Masyarakat Mandailing bila ada kerja adat, maka adat istiadat ini merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan sesuai dengan gelar yang dipegangnya. Seorang yang memiliki gelar apakah Mangaraja secara adat anak atau borunya pada saat Horja perkawinan, bila orang tua laki-lakinya (ayah) telah meninggal dunia tidak diadakan terlebih dahulu oleh anak-anaknya.

Jadi adat istiadat Mandailing ini sebenarnya sangat berat dilaksanakan, apalagi oleh mereka yang kurang mampu. Maka organisasi HIKMA menginginkan agar adat istiadat serta kesenian dan budaya yang ada dilestarikan oleh semua masyarakat Mandailing tanpa pilih bulu dengan tujuan agar budaya yang ada tidak hilang begitu saja dikikis oleh kebudayaan luar yang selalu merusak akhlak dan moral bangsa kita.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi HIKMA ini didukung oleh sebahagian masyarakat Mandailing akan

tetapi banyak pula yang menentangnya terutama dari golongan raja-raja adat yang menganggap bahwa kebesaran adat terutama mempergunakan Gordang Sambilan semata-mata hanyalah dimiliki para raja-raja.

Selain itu, organisasi HIKMA punya cara lain untuk memajukan putra-putri Mandailing adalah melalui pendidikan. Salah satu yayasan yang telah merintis di bidang pendidikan adalah Yapebuma (Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing). Yayasan ini dipimpin oleh Z. Pangaduan Lubis yang juga bersama-sama dengan HIKMA mempunyai cita-cita yang sama membangun tanah Mandailing. Dengan berbagai cara pendekatan yang ditempuhnya, yayasan itu berhasil memperoleh konsesi pemakaian areal tanah yang luas dan strategis untuk membangun sarana sekolah di sekitar Desa Maga kecamatan Kotanopan (Nasution, 1999:286).

Dari setiap penjelasan di atas mengenai segala aktivitas/kegiatan dari organisasi HIKMA kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuannya Himpunan Keluarga Besar Mandailing melaksanakan berbagai usaha sebagai berikut:

1. Mewujudkan usaha kerja sama dan saling membantu antar sesama warga Mandailing dalam Himpunan Keluarga Besar Mandailing.
2. Memupuk, meningkatkan hubungan persaudaraan secara kekeluargaan.
3. Melestarikan dan mengembangkan adat budaya Mandailing.

4. Membangun daerah Mandailing dan lain-lain tempat yang dianggap perlu.
5. Membina dan meningkatkan pembangunan moril dan material terhadap Putra Putri yang berasal dari Mandailing atau keluarga yang terhimpun di dalam keluarga besar Mandailing.

- **Fasilitas-Fasilitas HIKMA**

Dalam setiap pengembangan organisasi HIKMA para pengurus HIKMA tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya pengembangan organisasi. Contohnya hampir semua plank merek HIKMA yang tersebar di Sumatera Utara dibuat dan langsung di pasang di tempat HIKMA berada.

Organisasi HIKMA juga sangat berkeinginan untuk memajukan lagu-lagu daerah Mandailing, akan tetapi saat ini para penyanyi itu sudah mengkomersialkan kepandaianya, tanpa berpikir untuk mengusahakan daerah Mandailing. Selain itu, HIKMA juga telah membantu daerah-daerah Mandailing dalam pengadaan alat-alat olah raga, seperti peralatan bola kaki, volley, tenis meja dan pembinaan Nasyid (Nasution,1999:289).

Setidaknya Tano Mandailing kini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, dan telah juga dimekarkan menjadi Kabupaten Mandailing Natal. Ini bukan hanya berkat hasil kerja organisasi HIKMA saja, namun semua pihak yang terlibat yang telah membantu ikut serta membangun daerah Mandailing. Namun, melalui lembaga atau organisasi ini, para pengurus HIKMA bisa mendekati pejabat pemerintah agar

Mandailing mendapat perhatian. Kini, jalan setapak antara desa, sudah banyak yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk bus umum. Demikian pula saluran-saluran irigasi sudah banyak pula yang dibeton. Kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Medan dan yang akan melakukan KKN, dianjurkan agar memilih objek di tanah Mandailing. Kita berharap melalui mahasiswa-mahasiswa yang turun ke desa-desa Mandailing akan banyak memberikan manfaat.

Puncak pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah untuk tanah Mandailing, adalah pembangunan bendungan irigasi Sungai Batang Gadis yang berada di lintasan jalan raya antar daerah. Tepatnya adalah di antara kota Panyabungan dengan Kotanopan. Bangunan itu telah rampung pada tahun 1991. Tiada harapan yang lebih besar selain dari sebuah harapan peningkatan kehidupan masyarakat Mandailing dan Indonesia pada umumnya.

(Almarhum) Raja Inal Siregar, sebagai salah seorang putra yang berasal dari Tapanuli Selatan (Sipirok) yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah mencanangkan "*Marsipature Hutana Be*" (membenahi kampungnya masing-masing). Sebagaimana dengan tujuan HIKMA, maka gagasan Raja Inal waktu itu merupakan imbauan agar putra putrid daerah terutama yang telah sukses di rantau, dapat menyumbangkan karya dan darma baktinya untuk membangun kampung asalnya masing-masing (Nasution,1999:292).

Sepintas lalu kelihatannya himbauan itu berbau kedaerahan. Akan tetapi, menurut (almarhum) Raja Inal

Siregar, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan nasional, tiada salahnya dimulai dari yang kecil atau tingkat desa dan oleh mereka yang mempunyai ikatan batin di situ. Gagasan Raja Inal itu bagaikan ikut memacu program dan tujuan HIKMA atau sebaliknya. Para pengurus HIKMA berusaha mendekati tokoh-tokoh putra Mandailing yang dianggap cukup berhasil dalam kehidupannya. Tokoh-tokoh itu banyak yang bersimpati atas gagasan HIKMA. Namun, hingga saat ini rasanya partisipasi mereka belum memadai bila dibandingkan dengan kemampuan yang ada pada mereka. Memang sulit untuk merebut kepercayaan mereka. Mereka lebih senang berbuat secara pribadi-pribadi. Akibatnya banyak sumbangan mereka kurang efektif sasarannya. Kurang menyentuh kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Untuk menopang keuangan HIKMA, mereka mendirikan usaha kegiatan pengangkutan umum. Usaha itu berupa gabungan izin trayek pengangkutan bis umum dalam kota Medan dan luar kota terutama Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan perkembangan kota Medan usaha ini cukup efektif. Bis-bis yang tergabung, bukan saja dimiliki etnis Mandailing, tetapi banyak pula pemilik lainnya yang berasal dari etnis lainnya. Roda organisasi HIKMA ini tidak bisa hanya mengandalkan uang pribadi dari anggota HIKMA saja, akan tetapi organisasi ini harus berbuat lebih profesional agar tidak mengandalkan uang pribadi dari anggota HIKMA saja.

Adapun sumber-sumber kekayaan organisasi HIKMA yang diperoleh dari:

1. Iuran anggota.

2. Bantuan, sumbangan dari para dermawan dan simpatisan Mandailing maupun pemerintah yang tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
3. Usaha-usaha lain yang syah.
4. Semua kekayaan organisasi harus dibukukan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Organisasi HIKMA juga mempunyai atribut-atribut yang terdiri dari panji-panji, lambang-lambang dan lagu, ini adalah salah satu contohnya:

Andung “HIKMA”

Alak Mandailing, ulang ita tading Na mian di atubuan songon I
di pandaraman Salaklak sasingkoru, saanak saboru Salumpat
saindege, anso ita magabe

Tampakna do rantosna, rim ni tahi do gogpna Jaru di siadaoan,
todinta marsigonggoman Manat markahanggi, elek marranak
boru Somba ita marmora, anso murmabajora

Horas Mandailing

Mandailing tano sere i...aolonganta i

HIKMA markoum

Markoum marsiolkot, olong maroban domu

Domu gabe parsaulian i

Songon siala sampagul, rap tu ginjang rap tu toru Malamun
saulak lalu, madapu rap margulu Horas tondi madingin, pir
tondi matogu Sayur matua bulung, silang sae suada mara

Horas Mandailing

Mandailing tano sere Lagaolonganta i

HIKMA markoum 2x

Markoum marsisolkot, olong maroban domu

Domu gabe parsaulan i

Liiiiiiiiiii

iiiiiiiiiii

Oleh: Mhd. Bakhsan Parinduri (Jasinaloan)

**Dikumandangkan untuk pertama kali pada Minggu 24
Januari 2010 pada acara pelantikan PKC HIKMA Medan
Tembung.**

- Perubahan-Perubahan HIKMA Dari Dalam dan Luar

Sebagai sebuah kepastian, maka perubahan terus berlangsung bersama peredaran waktu. Sebagai sebuah organisasi, HIKMA terus pula melebarkan sayapnya. Seluruh daerah pemerintahan Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara, cabang organisasi HIKMA telah berdiri. Bahkan telah muncul

pula permintaan dari laur wilayah Sumatera Utara untuk mendirikan HIKMA. Menghadapi kenyataan itu, organisasi HIKMA sebenarnya harus berbangga. Akan tetapi, kita harus juga berpikir, bagaimana caranya agar sasaran dan tujuan organisasi lebih efektif.

HIKMA terus berusaha dengan segala kemampuannya agar putra-putri Mandailing dapat bangkit dari ketertinggalannya. Nama besar “Mandailing” yang tersurat dalam kitab “Negara Kertagama” hendaknya dapat pulih kembali memberikan andilnya dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Biarkanlah orang mengatakan “bermimpi”. Namun, organisasi HIKMA tak akan perduli selama yakin akan “impiannya itu” bukanlah hal yang mustahil.

Selain itu dalam proses membenahi organisasi PD HIKMA Medan, telah melakukan sosialisasi dan konsolidasi untuk pengembangan organisasi serta pembentukan struktur pengurus di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Secara administrasi 37 surat sudah diterbitkan, 12 diantaranya merupakan surat mandate PKC-HIKMA Kecamatan yang hasilnya sudah terbentuk 6 PKC HIKMA yakni Medan Johor, Medan Tembung, Medan Deli, Medan Amplas, Medan Maimun dan Medan Barat. Kemudian terbentuk 10 pengurus Komisaris Kelurahan dan seterusnya secara maraton, pembenahan ini dilakukan hingga akhir tahun 2010 sampai 21 PKC HIKMA di Medan terbentuk.

Sementara dari formulir keanggotaan yang disebar, sudah terkumpul sekira 1.876 formulir. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli

2009 meliputi kegiatan silaturahmi penguatan kepengurusan di jalan Mandala Bay Pass depan RM Rangkuti, kemudian kegiatan hari besar Islam Isra Mi'raj sekaligus penyambutan Ramadhan 1430 di Taman Budaya Sumatera Utara dihadiri para tokoh Mandailing.

Lalu, dilaksanakan juga sosialisasi pengembangan organisasi, baik dengan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid-masjid maupun di daerah potensial mayoritas warga Mandailing. Kemudian, mulai 10 Oktober 2009, PD-HIKMA Medan melantik pengurus HIKMA Kecamatan, dan pertama kali dilantik PKC HIKMA Medan Johor dengan ketua H. Mangatas. SH, S.Pn. M.Hum, kemudian Medan Tembung dengan ketuanya Muhammad Ridwan Rangkuti. Juga ada kegiatan pembentukan Koperasi PD-HIKMA Medan dengan nama Koperasi Serba Usaha Mandiri HIKMA dengan ketua Paruhum Sah Alam Lubis, kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW melalui pengurus Komisaris HIKMA kelurahan Sitirejo III di jalan Seksama Simpang Limun Medan.

Selain kegiatan eksternal itu, juga dilaksanakan berbagai kegiatan internal, diantaranya menghadiri acara berbuka puasa bersama dengan Jamiah Batak Muslim Indonesia (JBMI), audensi dengan ketua DPRD Medan, mengikuti seminar dari Departemen Dalam Negeri di Hotel Daksina, menghadiri acara silaturahmi Parsadaan Pomparan Ompu Guru Tatea, menghadiri pelantikan PD-HIKMA Deli Serdang, menghadiri pelantikan Ormas Pendawa Medan, menghadiri undangan sosialisasi sensus penduduk 2010 di Pemko Medan, serta lainnya.

PD-HIKMA akan terus menggulirkan inovasi-inovasi baik dalam pola pikir maupun dedikasi serta kreativitas dengan tujuan agar eksistensi PD-HIKMA Medan bersama anggotanya atau masyarakat Mandailing Medan, nyata dan jelas dalam aktivitasnya. Sebagai *middle generation* (generasi penengah), PD-HIKMA Medan akan berupaya membawa warga Mandailing Medan khususnya ke dalam kancah profesionallisme tanpa meninggalkan idealisme terhadap tradisi. Adat istiadat, sesuatu yang sangat sakral dan sangat penting untuk diimplementasikan dengan formula yang konstruktif agar bermanfaat untuk kehidupan di era modern, dalam kerangka mencapai kesejahteraan hidup di bawah panji-panji perspektif yang arif dan bijak juga tidak ego.

PD-HIKMA juga akan merekonstruksi pola pikir yang tradisional menjadi sebuah prospektus yang dinamis, ekonomis namun penuh dengan muatan budaya. Sehingga kondisi hidup warga Mandailing, berada di tingkat kesejahteraan yang ideal dan layak di sisi adat istiadat, di iringi jiwa nasionalis yang tinggi, mampu bersaing di era globalisasi sehingga masa depan akan berada di titik terang dan tetap aktif dalam perspektif partisipasi pembangunan.

Organisasi HIKMA juga diharapkan menjadi organisasi yang dapat membantu pembangunan daerah, khususnya Mandailing. Selain itu, juga diharapkan dimana pun berada warga HIKMA, harus mampu menunjukkan perannya dalam membantu pembangunan, termasuk di kota Medan. Seperti yang kita ketahui, kota Medan di huni oleh masyarakat multi etnis. Untuk itulah, HIKMA harus memberikan peran serta

dalam membina keamanan, kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

HIKMA diharapkan menjadi salah satu organisasi yang mampu menghimpun masyarakat untuk saling asah, asih dan asuh. HIKMA harus menjadi tempat untuk membicarakan apa yang terbaik bagi warga kita khususnya. Organisasi HIKMA dapat dibentuk dan dikembangkan di 21 kecamatan yang ada di kota Medan. Camat dan Lurah dapat memanfaatkan kehadiran HIKMA sebagai mitra dalam mewujudkan program-program Pemko Medan dan juga diharapkan dapat terbinanya serta terjalinnya kerjasama sesama pengurus dalam membina keluarga Mandailing.

BAB IV

KESIMPULAN

Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Organisasi sosial mencakup pranata-pranata yang menentukan kedudukan lelaki dan perempuan dalam masyarakat, dan dengan demikian menyalurkan hubungan pribadi mereka. Kategori ini pada umumnya dibagi lagi dalam dua jenis atau tingkat pranata-pranata, yaitu pranata yang tumbuh dari hubungan kekerabatan dan pranata yang merupakan hasil dari ikatan antara perorangan berdasarkan keinginan sendiri.

Struktur-struktur kekerabatan mencakup keluarga dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klen. Ikatan diantara orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan mulai dari "persaudaraan sedarah" dan persahabatan yang dilembagakan sampai ke berbagai macam "perkumpulan" rahasia dan bukan rahasia.

Di dalam organisasi sosial terkandung wujud yang berupa aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, pandangan hidup dan sebagainya yang membimbing, mengarahkan perilaku yang kemudian membuat perilaku-perilaku ini tampak

teratur, tampak berulang dan dapat diperkirakan (dlm Drs.Achmad Elvian, 2010:37).

Begitu juga dengan organisasi HIKMA yang merupakan perkumpulan yang bukan rahasia namun berdasarkan hubungan kekerabatan atau lebih tepatnya perkumpulan yang berdasarkan kesamaan etnis, yaitu etnis Mandailing. Organisasi HIKMA sendiri tidak hanya sekedar sebagai sebuah lembaga yang mengefektifkan dan mengembangkan adat istiadat dan budaya Mandailing yang berorientasi seni pagelaran untuk seremonial semata, tapi HIKMA memiliki visi dan misi lebih luas. Keinginan organisasi HIKMA ialah melakukan perluasan interpretasi adat istiadat dan budaya serta kemudian mengapresiasi secara konkrit dalam konteks kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai organisasi yang berlandaskan etnis, HIKMA berupaya agar adat istiadat dan budaya Mandailing jangan hilang dari jatidiri siapapun dari keluarga Mandailing, dan proses kehidupannya mesti berasaskan adat istiadat dan budaya Mandailing yang mengandung profesionalitas kerja dan tujuan sejahtera bersama dalam prinsip kesetiakawanan sosial, baik dalam keadaan suka (*sirion*) maupun duka (*siluluton*).

Keberadaan organisasi sosial yang berlandaskan etnis ini lebih banyak kita temui pada daerah-daerah urban seperti kota Medan atau Jakarta. Seperti yang diketahui kota Medan adalah daerah urban yang dihuni oleh berbagai etnis di dalamnya, dan salah satunya ialah etnis Mandailing. Masyarakat Mandailing yang menetap di daerah Medan pada

umumnya membentuk sebuah perkumpulan/ organisasi. Melalui organisasi ini masyarakat Mandailing bisa mengekspresikan identitas etnis mereka. Organisasi-organisasi ini telah menjadi mekanisme adaptasi untuk kehidupan kota, menjadi senjata dalam persaingan dengan kelompok etnis lain demi kelangsungan hidup mereka

Melalui organisasi masyarakat Mandailing bisa mengekspresikan identitas etnis mereka dan untuk mendukung kepentingan-kepentingan etnis. Selain itu, organisasi yang berlandaskan etnis seperti HIKMA bisa dijadikan senjata bagi mereka untuk memperbaiki keadaan-keadaan di kampung mereka atau bertindak sebagai “penyangga” (*buffer*) bagi para perantau baru yang masih kebingungan dengan lingkungan kota yang tidak bersahabat.

Selain itu juga, organisasi-organisasi tersebut memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan moral kepada para anggotanya dalam masalah-masalah keluarga selain dalam perdagangan dan bisnis. Mereka juga memakai organisasi-organisasi ini sebagai mekanisme adaptif dan sebagai wahana untuk mengekspresikan identitas etnis mereka. Selagi strategi-strategi adaptasi dikembangkan, maka organisasi-organisasi tersebut memperoleh keberartian sosial, ekonomi, dan politis yang lebih besar (Depres, dlm Urbanisasi dan Adaptasi, 1994). Organisasi-organisasi tersebut dibutuhkan para perantau untuk beradaptasi dengan suasana kota, dapat dimanipulasi untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok perantau.

Namun artikulasi kepentingan etnik dalam kota bukan berarti eksklusivitas etnis. Berbeda dengan Royce (dlm Urbanisasi dan Adaptasi ,1994), yang menyatakan bahwa label-label etnis itu penting artinya, terutama dalam hubungan antarsuku karena label-label itu bisa berfungsi sebagai titik sentral untuk menegaskan identitas etnis. Oleh karena itu, baik kita sadari atau tanpa kita sadari organisasi sosial sangat mempengaruhi kehidupan kelompok manusia manapun. Sebab dengan penguasaanya terhadap hubungan antara jenis kelamin dan dengan mengadakan kelanjutan sebuah kelompok, maka organisasi/ pranata itu menyentuh beberapa dari faktor penggerak biologis yang paling mendalam dari kehidupan manusia.

Dengan menugaskan bagaimana peranan seorang individu di antara sesamanya, dan menyediakan baginya cara-cara untuk mencapai gengsi, hal yang menurut pengamatan dimana-mana dikejar oleh manusia, organisasi/ pranata itu menimbulkan beberapa motivasi psikologis yang dalam pengalaman manusia termasuk motivasi yang paling merajainya. Jadi tanpa organisasi/ pranata sosial yang menyediakan mekanisme untuk mengatur perilaku, maka integrasi perorangan ke dalam masyarakat tidak akan mungkin.

Daftar Pustaka

- Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Drs. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Melville J.Herskovits, *Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat; Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Mudhafarsyah, *Kearifan Tradisional Masyarakat Desa Sibanggor Julu Yang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Lingkungan Alam Di Kabupaten Madina Sumatera Utara*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2007.
- H.Pandapotan Nasution,SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, FORKALA Prov.Sumatera Utara, 2005

- Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Syamsul Bahri Nasution SH dan Drs. Syaifuddin Mahyuddin SU, *The Lion Of North Sumatra* (Kisah Perjuangan H.M.Y.Effendi Nasution), USU Press, 1999.
- Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi (Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing)*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Weldemina Pattinama, *Organisasi Sosial Di Negeri Hualoy* (Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya), BPSNT Maluku dan Maluku Utara.
- Buku Panduan, *Sejarah HIKMA dan Keanggotaannya*, 2011.